

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mahfudz, A. (2021). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arifin, M. (2021). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayuningtyas, D. (2021). Model Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Partisipatif di Jawa Timur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(3).
- Eka Putra Jaya. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Evi Yulianti, & Tanuwijaya, H. (2020). Tipologi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Desa Nglanggeran. *Jurnal Kawistara*, 9(1).
- Fitriyah, H. (2023). Teknik Penyusunan Laporan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset Pendidikan Islam*, 10(1).
- Fitriyani, A. (2021). Analisis Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Program Perlindungan Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2).
- Heriyanto, H., Farah, R., & Fariq, A. (2023). Fiqh Siyasah: The Concept of Statehood in Islam and Its Implications for State Administration. *At Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 10(2).
- Herlan Suherlan, Adriani, Y., Evangelin, B. C., Rahmatika, C., Pah, D. A. S., Fauziyyah, I. J., Wibowo, L. A., & Hanafi, M. J. S. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 9(1).

- Jules Pretty. (2020). *Participatory Learning for Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Kemenparekraf. (2022). *Pedoman Umum Desa Wisata Berkelanjutan*. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)*.
- Mahfud, C. (2021). Pendekatan Lapangan dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1).
- Mahiransyah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marpaung, B., & Darmawan, M. (2022). Peran serta masyarakat dalam desa wisata berbasis budaya lokal. *Tourism and Society Journal*, 4(1).
- Moh Hidayatullah. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Alam (Studi di Desa Wisata Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Mukhlis, M. M., Maskun, M., Tajuddin, M. S., Aslan, J., Hariyanto, H., & Samosir, H. (2024). Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyasah. *Al Istimbah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Muslichah, I. (2022). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif: Validitas Data Lapangan. *Jurnal Ilmu Sosial Religius*, 6(2).
- Muslih, M. (2021). *Metodologi Penelitian Islam: Pendekatan Fikih Sosial dan Fikih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mustafid. (2023). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital. *El Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 11(1).
- Nugroho, A. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).

- Pina Azizah, Hilmi, M. I., & Fajarwati, L. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pancer Lestari). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2).
- Pradini, R. P. (2022). Implementasi Program Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Kota Batu). Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prasetyo, H., & Handayani, L. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 10(1).
- Putri, M. R., & Sahid, M. (2023). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Tanwir*, 5(1).
- Ramadhan, M., & Setiawan, A. (2021). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Desa*, 7(2).
- Resti Oktaviarni. (2023). Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Penta Helix di Desa Jambu Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1).
- Ridlwan, M. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2).
- Ridho, H., Khairi, A., Mujib, A., & Ahmed, S. (2024). Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(2).
- Sari, A., & Hidayatullah, A. (2021). Kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Suartha, I. N. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Kepariwisataan*, 19(2).
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarti, D., & Handayani, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(2).
- Umar, N. (2022). *Fikih Tata Kelola: Etika Politik Islam dalam Konteks Modern*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Wamba, N. G. (2011). Empowerment in Development: A Comparative Analysis. *Journal of Social Development in Africa*, 26(1).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Wulandari, D. A., & Sumartono, S. (2020). Strategi Persiapan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3).

Undang-Undang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Pasal 4.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Standar Kegiatan Desa Wisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Pasal 7.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Pasal 3.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Derah Jawa Timur Pasal 23 No 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Desa Wisata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2009) Tentang

Kepariwisataan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.